

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi merupakan salah satu situs sejarah paling penting di Indonesia yang mencerminkan kejayaan peradaban Melayu kuno. Keberadaan Kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi pertama kali tercatat dalam laporan S.C. Crooke, seorang perwira kehormatan asal Inggris, yang melakukan lawatan ke Hindia Timur pada tahun 1820. Dalam laporan tersebut, Crooke memperoleh informasi dari masyarakat setempat yang menemukan struktur bangunan candi dan artefak-artefak purbakala.

Kawasan Percandian Muaro Jambi merupakan tinggalan kebudayaan klasik dari masa Sriwijaya dan Melayu Kuno. Kawasan ini juga berfungsi sebagai pusat pendidikan agama Buddha pada abad VII hingga XIII, yang merupakan yang terluas di Indonesia dan Asia Tenggara. Pada tahun 671 Masehi, seorang pengelana asal Tiongkok, I-Tsing atau Yi Jing, mencatat bahwa ribuan biksu dari Thailand, India, Sri Lanka, Tibet, dan Cina datang ke Muaro Jambi untuk memperdalam ilmu sebelum melanjutkan perjalanan ke Nalanda.¹

Peradaban Muaro Jambi, yang telah dikenal sejak ratusan abad lalu, juga mencatatkan peran penting Atisa Dipamkara Shrijnana, seorang tokoh yang dikenal dalam perkembangan Buddhisme di Tibet. Atisa tinggal dan belajar di Candi Muaro

¹ Menurut buku Muaro Jambi Dulu, Sekarang, dan Esok yang diterbitkan oleh Balai Arkeologi Sumatera Selatan (2009:30)

Jambi antara tahun 1011 hingga 1023 Masehi. Sebagai murid dari guru besar Buddhis Serlingpa Dharmakirti, Atisa mempelajari ajaran Boddhi Citta, yang berfokus pada pencerahan batin melalui cinta kasih dan welas asih. Pengaruh Atisa dalam perkembangan Buddhisme sangat besar, baik di Tibet maupun di dunia secara umum, sehingga ajarannya tetap relevan hingga saat ini.

Kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi, yang memiliki luas 3.981 hektare, terletak di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kawasan ini menyimpan 82 reruntuhan bangunan kuno, yang dikenal dengan sebutan menapo. Beberapa bangunan telah dipugar, di antaranya Candi Tinggi, Candi Gumpung, Candi Astana, Candi Kembar Batu, Candi Gedong I, Candi Gedong II, Candi Tinggi I, Candi Kedaton, dan Candi Teluk I.

Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 259/M/2013, tentang kawasan Percandian Muaro Jambi ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional. Kawasan ini meliputi tujuh desa di Kabupaten Muaro Jambi, yaitu Desa Dusun Baru, Desa Danau Lamo, Desa Muara Jambi, Desa Kemingking Luar, Desa Kemingking Dalam, Desa Teluk Jambu, dan Desa Dusun Mudo.

Selain bangunan candi, kawasan ini juga menyimpan berbagai sisa peradaban, seperti kolam kuno, danau, dan jaringan kanal yang pada masa lalu berfungsi sebagai jalur transportasi untuk menghubungkan bangunan-bangunan candi. Kanal-kanal tersebut terhubung dengan sungai-sungai alam yang bermuara ke Sungai Batanghari. Situs ini memiliki nilai historis dan arkeologis tinggi, dengan

peninggalan berupa kompleks percandian yang membentang sepanjang 7,5 kilometer di tepi Sungai Batanghari.

Dengan adanya penetapan sebagai Cagar Budaya Nasional, Kawasan Percandian Muaro Jambi memiliki potensi besar untuk diakui sebagai Warisan Dunia oleh UNESCO. Pada tahun 2009, kawasan Candi Muaro Jambi diajukan untuk menjadi warisan dunia, dan sejak itu telah masuk dalam daftar tentatif UNESCO. Namun, hingga 2020, status tersebut masih berada dalam daftar tunggu.

Kini, Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi menghadapi ancaman serius dari aktivitas industri akibat keberadaan aktivitas perusahaan batu bara, khususnya area *stockpile* yang berada tidak jauh dari kawasan inti cagar budaya. Kompleksitas persoalan muncul akibat aktivitas pertambangan batu bara yang berlangsung di sekitar kawasan tersebut, khususnya keberadaan *stockpile* yang berpotensi mengancam kelestarian situs bersejarah. Konflik kepentingan terjadi antara kebutuhan ekonomi perusahaan pertambangan, upaya pelestarian warisan budaya serta perlindungan lingkungan historis. Kehadiran aktivitas industri ini menimbulkan konflik antara kepentingan ekonomi perusahaan dan upaya pelestarian budaya oleh pemerintah serta masyarakat lokal.

Arsitektur purba berupa bangunan candi-candi terpendam berabad-abad silam. Sebagian reruntuhan bangunan telah dipugar dan dibuka untuk wisatawan. Sementara masih ada puluhan gundukan tanah yang di dalamnya menyimpan struktur bangunan kuno. Namun kini situs Percandian Muarajambi yang

menyandang predikat Cagar Budaya Nasional itu sudah lama terancam oleh aktivitas industri.

Stockpile adalah tempat penumpukan batu bara. Batu bara di *stockpile* itu didatangkan dari sejumlah daerah di Jambi, kemudian diangkut kapal tongkang lewat jalur perairan Sungai Batanghari. *Stockpile* yang didatangkan ini memasuki kawasan situs candi, termasuk wilayah Candi Teluk I di Kawasan Cagar Budaya Muarajambi di Kabupaten Muaro Jambi yang dalam progres pemugaran keberadaanya sekarang terkepung oleh *stockpile* Batu Bara. Bangunan candi yang menjadi saksi bisu peradaban masa lampau masih terkepung alat berat, pabrik, dan industri *stockpile* batu bara. Kawasan Cagar Budaya yang berada di sisi selatan Desa Muara Jambi itu seakan tak berdaya menghadapi *stockpile* batu bara sejak satu dekade terakhir.

Sejak sebelum tahun 2009, memang sudah ada aktivitas *stockpile* batu bara di kawasan tersebut, bahkan sejak tahun 90-an di bekas perusahaan polywood. Keberadaan perusahaan tambang dan industri lainnya yang mengelilingi kawasan candi, seperti PT Rakindo Unitrust Mandiri (RUM), PT Nan Riang, PT Bukit Tambi, PT Tegas Guna Mandiri (TGM), dan PT Sinar Alam Permai (SAP), berisiko merusak kawasan situs dan mencemari sungai Batanghari yang mengalir di sekitar kawasan. Selain itu, aktivitas industri, seperti getaran mesin dan limbah yang dihasilkan, semakin memperburuk kondisi cagar budaya, bahkan dapat mempercepat kerusakan situs. Hingga pada tahun 2010, ekspansi *stockpile* batu bara semakin tak terbendung.

Begitu pula sejak 2011, pegiat candi mulai menolak keras keberadaan *stockpile* batu bara yang berada di seberang desanya. Tumpukan ratusan ribu ton “emas hitam” yang menggunung dengan aktivitas alat beratnya di beberapa titik lokasi menjadi ancaman serius terhadap pelestarian cagar budaya. Karena lokasi *stockpile* batu bara yang begitu dekat, masyarakat sekitar khawatir debu batu bara bisa mempercepat pelapukan bangunan candi. Ancaman terhadap situs kian nyata dengan ditemukannya tumpukan batu bara yang sangat dekat dari struktur candi, seperti di Candi Teluk I. Aktivitas alat berat dan pencemaran dari limbah batu bara diduga mempercepat pelapukan struktur bata candi. Bahkan, seorang pegiat budaya setempat, mencatat adanya rembesan air bercampur batu bara yang menghitamkan dan mengikis bangunan cagar budaya.

Tidak hanya berdampak pada bangunan maupun budaya, adanya *stockpile* ini juga membawa dampak bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan. Pencemaran lingkungan akibat debu yang dibawa angin dan limbah yang mencemari sungai Batanghari telah menambah beban bagi masyarakat setempat. Investigasi oleh Jaringan Energi Berkeadilan (JEB) Jambi menemukan bahwa pencemaran yang terjadi memengaruhi kesehatan masyarakat, seperti gangguan pernapasan dan gatal-gatal akibat debu yang terbawa angin.²

Debu batu bara yang beterbangan menyebabkan gangguan pernapasan, seperti batuk menahun dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), serta

² Teguh Suprayitno. 2024. *Stockpile Batubara Ancaman Cagar Budaya Candi Muarojambi*. Di akses pada 12 Januari 2025. <https://www.mongabay.co.id/2024/08/12/stockpile-batubara-ancaman-cagar-budaya-candi-muarojambi/>

mengganggu aktivitas sehari-hari warga, termasuk kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Selain itu, kerusakan fisik yang disebabkan oleh kegiatan industri di sekitar kawasan situs, seperti abrasi pinggiran sungai dan kerusakan akibat aktivitas pengangkutan batu bara, juga menjadi masalah serius yang perlu diselesaikan. Berdasarkan analisis tim paralegal, industri tambang batu bara dan sawit seharusnya tidak boleh beroperasi di zona inti dan penyangga cagar budaya.³

Situasi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan dan penegakan regulasi. Sejumlah perusahaan diketahui beroperasi di zona inti dan zona penyangga KCBN, meski regulasi seperti Keputusan Mendikbudristek No.135/M/2023 secara tegas melarang aktivitas industri di wilayah tersebut. Analisis spasial menunjukkan tumpukan batu bara dan kanal industri mengapit situs-situs penting seperti Candi Teluk I, Teluk II, dan Menapo lainnya.

Adanya ketegangan antara kepentingan pelestarian budaya dan eksploitasi sumber daya alam ini maka memerlukan resolusi konflik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Lebih jauh, kondisi ini turut menghambat upaya Indonesia dalam mengusulkan Candi Muaro Jambi sebagai warisan dunia UNESCO, yang mensyaratkan integritas, kelestarian, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan situs budaya. Meskipun telah diusulkan sejak 2009, hingga kini status tersebut belum diperoleh, salah satunya karena kawasan belum steril dari aktivitas industri yang merusak integritas situs.

³ Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 135/M/2023 tentang Sistem Zonasi Kawasan Cagar Budaya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat, akademisi, dan pemerintah daerah, termasuk melalui diplomasi budaya dan kampanye penyelamatan situs. Suara-suara penolakan terus digaungkan dengan lantang, baik itu lewat puisi ataupun kampanye dan aksi. Namun sayangnya, suara-suara penolakan itu, oleh pemangku kebijakan dianggap angin lalu. Bangunan candi dan struktur reruntuhan bata atau disebut menapo sampai kini masih terkepung alat berat, pabrik, dan *stockpile* batu bara. Hingga kini, keberadaan *stockpile* kian bertambah dan suara penolakan masyarakat selama lebih dari satu dekade belum mampu menggeser dominasi aktivitas industri. Keberadaan industri dan aktivitas lainnya yang mengelilingi kawasan candi, termasuk perkebunan kelapa sawit, menjadi ancaman serius terhadap kelestarian situs candi.

Di sisi lain, pemerintah pusat menunjukkan tanda-tanda perhatian, dengan kunjungan pejabat tinggi dan rencana penataan kawasan oleh Kementerian ATR/BPN. Meski demikian, tumpukan batu bara masih bercokol di lokasi, menandakan belum adanya tindakan nyata yang tuntas. Hal ini mencerminkan lemahnya sinergi antar-lembaga dalam menyelesaikan konflik antara konservasi budaya dan kepentingan ekonomi.

Konflik yang terjadi di Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan administratif atau teknis, seperti pelanggaran perizinan atau ketidaksesuaian dengan tata ruang. Konflik ini justru merefleksikan dinamika yang lebih kompleks, mencakup relasi sosial antar pemangku kepentingan, ketimpangan komunikasi, serta pertarungan nilai antara kepentingan ekonomi dan pelestarian budaya. Dalam konteks ini, keberadaan

industri seperti stockpile batu bara di sekitar kawasan cagar budaya tidak hanya berimplikasi terhadap kerusakan fisik situs warisan budaya, tetapi juga menimbulkan ketegangan sosial dan dilema kebijakan bagi para pemangku kepentingan.

KCBN Muaro Jambi bukan hanya merupakan situs arkeologis bernilai sejarah tinggi, tetapi juga menjadi ruang sosial yang dihuni oleh masyarakat lokal, dilindungi oleh negara, dan memiliki nilai spiritual serta edukatif yang mendalam. Ketika konflik terjadi tanpa mekanisme penyelesaian yang inklusif, maka kelangsungan kawasan ini sebagai warisan budaya dunia dapat terancam. Oleh karena itu, pendekatan *conflict resolution* berbasis transformasi hubungan sosial menjadi penting untuk dianalisis. Pendekatan ini menekankan pentingnya membangun kembali relasi kepercayaan, menciptakan komunikasi yang partisipatif, serta menemukan titik temu antara pelestarian dan pembangunan.

Melalui penelitian ini, penting untuk menganalisis dinamika konflik yang berlangsung di kawasan tersebut, mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat beserta kepentingannya, serta menelaah strategi resolusi konflik yang telah dilakukan maupun potensi solusi yang dapat dikembangkan. Dengan pendekatan resolusi konflik yang berpijak pada prinsip keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan, diharapkan dapat dirumuskan suatu model penyelesaian yang tidak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi juga mendukung pelestarian kawasan cagar budaya secara holistik dan berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep conflict resolution dalam menangani konflik antara perusahaan batu bara dengan pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi, khususnya di area stockpile. Sehingga dalam hal ini, dapat melihat dinamika konflik yang terjadi, aktor-aktor yang terlibat, serta upaya resolusi yang telah atau bisa ditempuh. Untuk memperkuat adanya penelitian ini, maka dibutuhkan penelitian terdahulu sebagai pendukung. Adapun hasil dari penelitian sebelumnya meliputi hal-hal berikut.

Pertama, penelitian oleh Maherty, Etika (2023) dengan judul "Kajian Penerapan Konsep Restorasi pada Kawasan Percandian Muaro Jambi." Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Studi ini mendeskripsikan pelestarian kawasan percandian Muaro Jambi dengan penerapan asas pencagaran restorasi untuk memastikan keberlanjutan, keaslian, dan keterjagaan situs sebagai warisan budaya penting. Dari hasil studi diperoleh hasil yaitu untuk melakukan restorasi pada Percandian Muaro Jambi dapat dilakukan dengan perawatan rutin, pelibatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kerusakan di kawasan tersebut mengingat usia candi yang sudah tua, serta pembatasan jumlah pengunjung ketika kondisi candi sedang dalam masa perawatan. Selain itu, diperlukan peningkatan kegiatan pengawasan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut akibat tindakan manusia dan bencana alam. Dengan begitu, azas pencagaran restorasi akan diterapkan sebagai pendekatan utama dalam merumuskan strategi pelestarian yang berkelanjutan.

Kedua, Penelitian oleh Sulistyanto, B. (2023) yang berjudul "Benturan Kepentingan, Suatu Refleksi dalam Pengelolaan Warisan Budaya di Indonesia." Metode yang digunakan adalah eksplanatif kualitatif eksplanatif yakni upaya memahami mengapa fenomena dapat terjadi dan apa faktor penyebabnya. Hasil penelitian ini menyatakan konflik warisan budaya tidak harus dikonotasikan sebagai fenomena yang negatif. Konflik warisan budaya merupakan cermin lemahnya sistem pengelolaan yang akan menjadi bagian dari solusi atas suatu permasalahan yang mendorong ke arah perubahan yang lebih baik. Penelitian merefleksikan benturan kepentingan dalam pengelolaan warisan budaya di Indonesia, yang relevan dengan konteks konflik antara pelestarian cagar budaya dan aktivitas industri.

Ketiga, Penelitian oleh Septriani, Cindy (2024) yang berjudul "Pandangan dan Relasi Antar Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Candi Muara Jambi Kabupaten Muaro Jambi". Penelitian ini menggunakan pendekatan orientasi pemangku kepentingan (*Actor-Oriented Approach*). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik melalui observasi, wawancara, justifikasi informan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengidentifikasi pandangan dan relasi antar pemangku kepentingan diantaranya pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Fakta daripada hasil penelitian yang ditemukan adalah adanya perbedaan sudut pandang para pemangku kepentingan, meski memiliki tujuan yang sama. Perbedaan sudut pandang ini ditemukan dari bentuk relasi yang relatif rendah. Perbedaan ini terjadi, karena ada pola relasi yang masih timpang antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah, dan

pemerintah dengan masyarakat. Ketimpangan pola relasi ini juga menjadi salah satu permasalahan yang mempengaruhi bentuk kerjasama, koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan Cagar Budaya Candi Muara Jambi. Analisis relasi yang didapatkan adalah pemangku kepentingan di Cagar Budaya Candi Muara Jambi belum harmonis dan maksimal dalam menciptakan formula pengelolaan kawasan cagar budaya.

Penelitian mengenai penerapan konsep conflict resolution dalam menangani konflik antara perusahaan batu bara dengan pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi merupakan topik yang sangat menarik untuk diangkat atau dilakukan karena alasan berikut. Pertama, konflik ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kepentingan ekonomi dan upaya pelestarian warisan budaya bangsa. Di satu sisi, perusahaan batu bara menjalankan aktivitas yang berdampak pada perekonomian lokal maupun nasional. Di sisi lain, keberadaan KCBN Muaro Jambi memiliki nilai sejarah, spiritual, dan arkeologis yang luar biasa penting, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga dunia. Kedua, adanya kompleksitas hubungan antara para pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat dan daerah, perusahaan tambang, aparat penegak hukum, serta komunitas pelestari menunjukkan bahwa konflik ini tidak bisa hanya diselesaikan melalui pendekatan legalistik semata, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih humanis dan transformatif. Ketiga, pemahaman mendalam terhadap konflik antara perusahaan batu bara dan pengelola KCBN Muaro Jambi diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan strategi resolusi yang mengedepankan keadilan sosial, pelestarian budaya, dan pembangunan berkelanjutan. Keempat, penelitian ini juga berpotensi

memperkaya khazanah keilmuan di bidang ilmu pemerintahan, kebijakan publik, serta studi resolusi konflik, terutama dalam konteks pengelolaan kawasan warisan budaya yang bersinggungan dengan kepentingan ekonomi.

Mengacu pada masalah yang telah dirincikan dalam literatur di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Konsep Conflict Resolution antara Perusahaan Batu Bara dengan Pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi” melalui Studi Kasus Keberadaan Stockpile di Dalam Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Konsep *Conflict Resolution* antara Perusahaan Batu Bara dengan Pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi?
2. Bagaimana Upaya dalam Penerapan Konsep *Conflict Resolution* antara Perusahaan Batu Bara dengan Pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Konsep *Conflict Resolution* antara Perusahaan Batu Bara dengan Pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi.

2. Untuk melihat upaya dalam Penerapan Konsep *Conflict Resolution* antara Perusahaan Batu Bara dengan Pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah resolusi konflik dan pengelolaan sumber daya berbasis nilai budaya. Melalui eksplorasi terhadap pendekatan *conflict resolution*, penelitian ini memberikan studi kasus konkret di Indonesia yang memperlihatkan relasi sosial yang adil dan komunikatif. Hal ini memberikan ruang bagi pengembangan teori resolusi konflik berbasis nilai-nilai lokal dan kearifan budaya yang selama ini belum banyak diangkat dalam literatur akademik. Selain itu, penelitian ini juga memperluas aplikasi pendekatan *multi-stakeholder analysis* dan *participatory governance* dalam konteks pelestarian kawasan cagar budaya. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan teoritis bagi studi-studi sejenis yang mengkaji konflik sumber daya alam di wilayah yang memiliki sensitivitas historis dan kultural.

b. Secara Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan konflik antara perusahaan batu bara dan pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi. Dengan

mengidentifikasi akar konflik, pola komunikasi antarpihak, serta hambatan dalam proses penyelesaian konflik, penelitian ini menawarkan pendekatan resolusi berbasis dialog, mediasi, dan transformasi relasi yang dapat dijadikan panduan dalam merancang intervensi kebijakan yang lebih inklusif. Penelitian ini juga dapat menjadi pedoman bagi pengelola kawasan cagar budaya, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat adat dan komunitas pelestari, untuk mengembangkan strategi perlindungan kawasan yang adaptif terhadap tekanan eksternal, termasuk ekspansi industri. Hasil penelitian dapat membantu mereka dalam menyusun protokol atau mekanisme mitigasi konflik yang bersifat preventif dan partisipatif. Bagi perusahaan tambang atau pelaku industri ekstraktif, penelitian ini memberikan insight mengenai pentingnya pendekatan keberlanjutan (sustainability) yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial, budaya, dan lingkungan. Dengan menerapkan prinsip *corporate social responsibility* (CSR) yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai lokal dan pelestarian warisan budaya, perusahaan dapat membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan menciptakan iklim investasi yang lebih stabil. Lebih jauh lagi, manfaat praktis penelitian ini juga mencakup dukungan terhadap penyusunan kebijakan publik oleh pemerintah daerah maupun pusat, terutama dalam aspek penataan ruang, pengawasan izin industri, hingga perumusan regulasi yang menjamin keberlanjutan kawasan cagar budaya. Diharapkan, hasil penelitian ini menjadi landasan awal dalam menyusun kerangka kebijakan

pelestarian yang terintegrasi dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada tujuan ke-11 (kota dan permukiman yang berkelanjutan) dan ke-15 (melestarikan ekosistem daratan).

1.5 Landasan Teori

John Burton merupakan salah satu pelopor dalam bidang resolusi konflik modern. Ia mengembangkan pendekatan yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia (*basic human needs*) sebagai inti dari penyebab konflik dan solusi jangka panjang. Menurut Burton, konflik sosial tidak semata-mata merupakan hasil dari kesalahpahaman atau perbedaan kepentingan, tetapi lebih dalam lagi disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi, seperti identitas, keamanan, pengakuan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.⁴ Ia mengembangkan pendekatan resolusi konflik proaktif, yang berbeda dari pendekatan tradisional seperti manajemen konflik atau kontrol konflik. Oleh karena itu, penyelesaian konflik harus dilakukan dengan menggali dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut melalui pendekatan dialogis dan partisipatif.⁵

1.5.1 Konsep Utama dalam Teori Burton

a. Kebutuhan Dasar Manusia (*Basic Human Needs Theory*)

Teori ini didasarkan pada pandangan bahwa semua manusia memiliki kebutuhan dasar yang tidak dapat dikompromikan seperti identitas, pengakuan,

⁴ John W. Burton, *Conflict: Human Needs Theory*, ed. John Burton (New York: St. Martin's Press, 1990), hal. 36.

⁵ Ibid

keamanan, otonomi, dan partisipasi.⁶ Ketika kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka potensi konflik meningkat secara signifikan. John Burton menekankan bahwa upaya penyelesaian konflik yang hanya menekankan pada kompromi kepentingan jangka pendek tidak akan berhasil secara berkelanjutan jika kebutuhan dasar ini tidak dipenuhi.⁷

Kebutuhan dasar, menurut Burton, bersifat *non-negotiable*, artinya tidak bisa ditukar atau dinegosiasikan, karena melekat pada eksistensi manusia.⁸ Oleh karena itu, pendekatan resolusi konflik harus berfokus pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut dan menciptakan ruang dialog yang memungkinkan masing-masing pihak untuk menyuarakan identitas dan kepentingannya secara aman. Kebutuhan Dasar John Burton meliputi 8 indikator yang menyesuaikan dengan kajian penelitian ini, yaitu:

No	Kebutuhan Dasar	Bahasa Inggris	Penjelasan
1	Keamanan	<i>Security</i>	Rasa aman dari ancaman fisik, struktural, dan psikologis.
2	Pengakuan	<i>Recognition</i>	Diakui identitas, nilai, dan eksistensinya.
3	Identitas	<i>Identity</i>	Hak untuk mempertahankan identitas budaya, agama, atau kelompok.

⁶ John W. Burton, *Conflict: Resolution and Prevention* (London: Macmillan, 1990), hal. 25.

⁷ Ibid

⁸ Ibid

4	Otonomi	<i>Autonomy</i>	Kebebasan untuk mengatur diri sendiri dan tidak didominasi.
5	Partisipasi	<i>Participation</i>	Keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi dirinya.
6	Harga Diri	<i>Self-esteem</i>	Merasa dihargai dan memiliki nilai dalam masyarakat.
7	Rasa Memiliki	<i>Belongingness</i>	Perasaan menjadi bagian dari komunitas atau kelompok sosial.
8	Pemenuhan Diri / Arti Hidup	<i>Personal Fulfillment atau Meaning</i>	Menjalani hidup yang bermakna dan mencapai potensi diri.

Tabel 1.1 Indikator Basic Human Needs John Burton

Maka, dari penjelasan di atas, teori ini sangat relevan untuk diterapkan dalam analisis konflik yang bersifat kompleks dan berkepanjangan, seperti konflik antara aktivitas pertambangan batu bara dan upaya pelestarian kawasan cagar budaya. Dalam kasus tersebut, perusahaan mungkin mengejar kebutuhan ekonomi dan eksistensi (*survival*), sedangkan pengelola kawasan cagar budaya berusaha mempertahankan identitas budaya dan sejarah yang menjadi bagian dari kebutuhan kolektif masyarakat. Teori Burton sangat relevan diterapkan dalam konteks konflik yang melibatkan benturan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian identitas budaya atau sejarah. Adanya konflik antara aktivitas perusahaan batu bara dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) seperti di Muaro Jambi, pendekatan ini membantu dalam memahami bahwa konflik bukan hanya soal tumpang tindih kepentingan, tapi juga terkait dengan identitas, warisan budaya, dan kebutuhan pengakuan masyarakat adat serta pengelola kawasan.

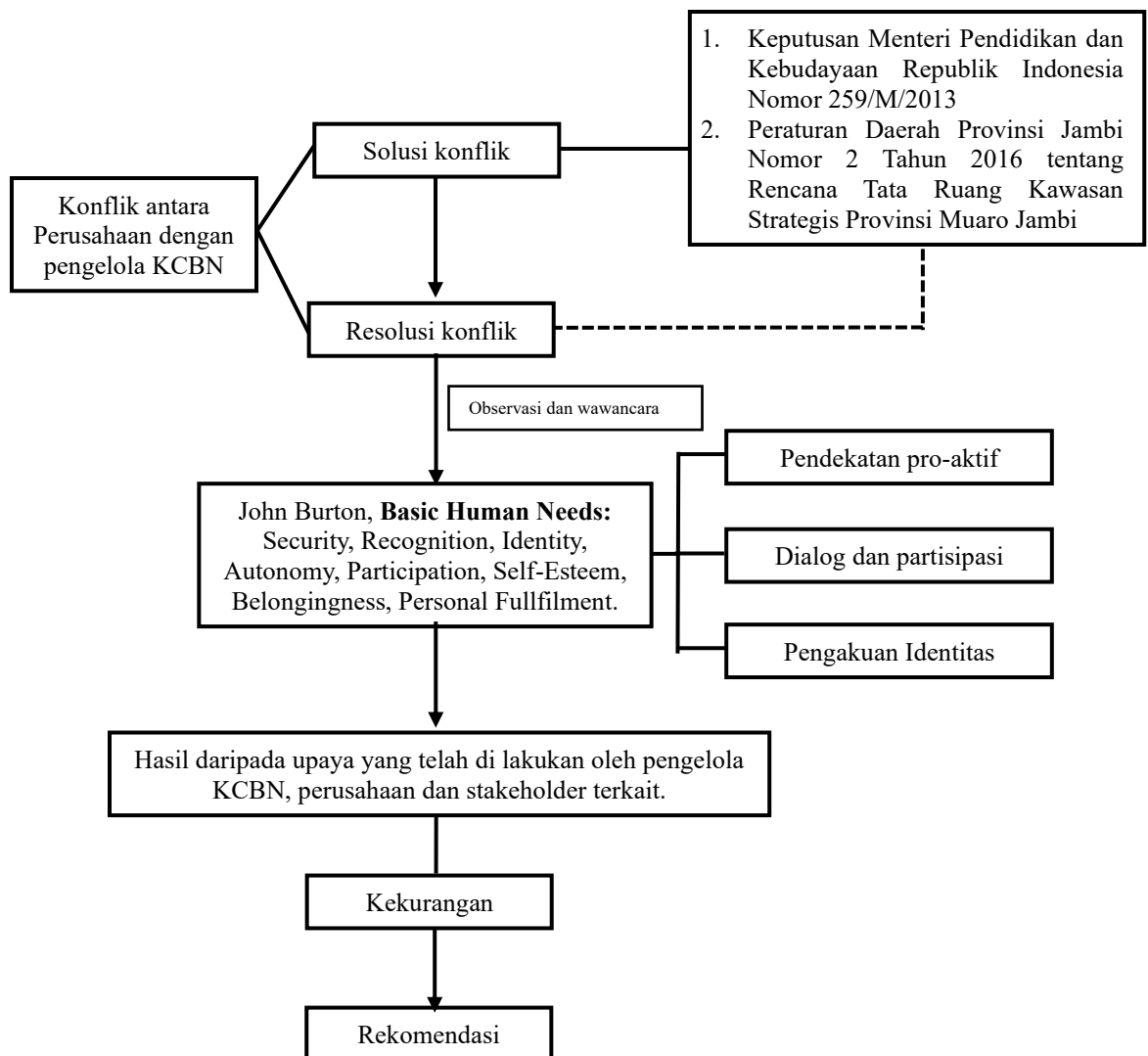
Maka, dari penjelasan diatas, teori yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Konsep	Penjelasan	Penerapan Kasus
Kebutuhan Dasar (<i>Basic Human Needs</i>)	Konflik muncul akibat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia (psikologis, sosial, ekonomi).	Menilai apakah konflik antara perusahaan batu bara dan pengelola kawasan cagar budaya disebabkan oleh ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar kedua belah pihak (misalnya, akses ekonomi vs. pelestarian budaya).
Pendekatan Resolusi Konflik Proaktif	Menyelesaikan konflik dengan cara yang mendalam, berfokus pada akar masalah, bukan hanya gejalanya.	Fokus pada akar penyebab konflik di antara pihak-pihak terkait, misalnya, bagaimana kebijakan atau regulasi saat ini tidak mencegah konflik antara pertambangan dan pelestarian budaya.
Dialog antara Pihak-Pihak yang Berkonflik	Penyelesaian konflik membutuhkan dialog terbuka untuk memahami posisi dan kebutuhan masing-masing pihak.	Membuka jalur komunikasi antara perusahaan batu bara, pengelola cagar budaya, DLH, dan Ditjen ESDM untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan semua pihak.
Pengakuan Identitas dan Kepentingan	Konflik sering terjadi karena pihak-pihak merasa identitas mereka terancam. Pengakuan terhadap kepentingan sangat penting.	Mengidentifikasi dan mengakui kepentingan masing-masing pihak: perusahaan batu bara yang ingin mengeksplorasi sumber daya, dan pengelola kawasan cagar budaya yang ingin melestarikan nilai sejarah dan budaya.

Tabel 1.2 Teori Aplikatif John Burton

1.6 Kerangka Pikir

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, maka berikut ini merupakan kerangka pikir yang memuat tentang Penerapan Konsep Conflict Resolution antara Perusahaan Batu Bara dengan Pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi.



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk menggali dan memahami secara mendalam tentang penerapan konsep resolusi konflik antara perusahaan batu bara dan pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi. Metode penelitian kualitatif dipilih karena mampu memberikan wawasan yang komprehensif mengenai konteks sosial, budaya,

ekonomi, dan politik yang mempengaruhi dinamika konflik dan upaya penyelesaiannya.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pihak manajemen perusahaan batu bara, pengelola KCBN Candi Muaro Jambi, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang beragam tentang akar konflik, tantangan, dan peluang penyelesaian yang dapat dikembangkan.

Melalui pendekatan kualitatif ini, peneliti dapat menginterpretasikan data dengan cara yang lebih fleksibel, sehingga mampu menggali makna yang lebih dalam dari pengalaman dan pandangan para pihak yang terlibat dalam konflik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menguraikan secara komprehensif model penerapan resolusi konflik yang efektif, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk kebijakan pengelolaan kawasan cagar budaya yang bersinggungan dengan aktivitas pertambangan.

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika konflik antara perusahaan batu bara dengan pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi, serta bagaimana konsep *resolusi konflik* diterapkan dalam menyikapi konflik tersebut.

Metode ini dianggap sesuai karena fokus penelitian terletak pada jenis makna, proses, dan dinamika sosial yang tidak dapat dikuantifikasi secara numerik.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan masalah, keadaan dan peristiwa yang ada. Hal ini dilakukan untuk mengungkapkan informasi yang diperoleh di lapangan dan memberikan gambaran yang tidak bias tentang situasi yang akan diteliti. Menurut Rukajat, pendekatan deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara realistis, nyata, dan aktual karena penelitian ini terdiri dari membuat uraian, gambar, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan tepat tentang fakta, karakteristik, dan hubungan antara fenomena yang dipelajari.¹⁰

1.7.2 Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian bertujuan untuk memperjelas fokus kajian dan merangkum ruang lingkup pembahasan terhadap fenomena konflik yang kompleks antara sektor industri dan pelestarian budaya. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah kawasan *stockpile* perusahaan batu bara yang berada di sekitar Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Lokasi ini dipilih karena merupakan titik krusial dalam munculnya konflik antara aktivitas penambangan batu bara dan upaya pelestarian situs warisan budaya nasional. Di wilayah ini terjadi tumpang tindih antara kepentingan ekonomi yang diwujudkan melalui aktivitas pemanfaatan lahan untuk penimbunan dengan kepentingan

⁹ Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja.

¹⁰ Ajat Rukajat. (2018). Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach. Yogyakarta: Deepublish.

pelestarian nilai sejarah, arkeologi, dan budaya yang dilindungi oleh pengelola KCBN.

Melalui studi lapangan di lokasi tersebut, peneliti dapat mengamati langsung bentuk-bentuk interaksi, ketegangan, hingga strategi komunikasi dan resolusi yang dilakukan oleh berbagai aktor, seperti perusahaan, pengelola, pemerintah daerah, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V, Dinas Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, serta masyarakat setempat. Penelitian ini mencakup analisis terhadap kebijakan yang diberlakukan, mekanisme penyelesaian konflik yang dijalankan, serta dampak dari aktivitas industri terhadap kelangsungan kawasan cagar budaya.

1.7.3 Fokus Penelitian

Untuk mempermudah analisis dalam pembahasan penelitian, peneliti akan membatasi fokus penelitian pada penerapan penyelesaian konflik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah, pengelola kawasan cagar budaya, dan perusahaan batu bara, dalam menangani permasalahan tumpang tindih antara aktivitas industri dan pelestarian budaya di kawasan stockpile di sekitar Situs Cagar Budaya Muaro Jambi.

Pembatasan fokus ini bertujuan untuk memberikan analisis yang mendalam terhadap dinamika konflik yang terjadi serta upaya konkret penyelesaiannya, sehingga memudahkan pemahaman mengenai bagaimana konsep *resolusi konflik* diterapkan dalam konteks konflik kepentingan ekonomi dan pelestarian warisan budaya. Penelitian ini juga akan mengkaji tantangan yang dihadapi dalam

implementasi strategi penyelesaian konflik tersebut, serta dampaknya terhadap kelangsungan kawasan cagar budaya dan keharmonisan hubungan antara aktor-aktor yang terlibat.

1.7.4 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang dilakukan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah suatu metode non-sampling di mana peneliti memilih sampel dengan sengaja, memastikan pengambilan contoh dengan menggunakan kriteria khusus dan yang sesuai agar mempermudah respons terhadap penelitian dan tujuan riset.¹¹ Pada penelitian ini, informan yang dipilih atau ditentukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan sumber data informasi agar informasi yang dikembangkan bisa didapatkan data yang akurat.

- a. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V
- b. Dinas Lingkungan Kabupaten Muaro Jambi (DLH)
- c. Kantor Perwakilan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Provinsi Jambi
- d. Pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi
- e. Informan melalui media massa seperti website Mangobay yaitu Bapak Agus Widiatmoko Kepala Balai Pelestarian Wilayah V Jambi dan Bangka Belitung
- f. Informan melalui kanal YouTube Najwa Shihab, yaitu Bapak Hilmar Farid, Direktur Jendral Kebudayaan Kemendikbudristek RI

¹¹ Op.Cit., hlm. 89.

1.7.5 Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber yang beragam, baik berupa pernyataan verbal, tindakan observasi, maupun dokumen tertulis. Sugiyono menyatakan bahwa bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif terdiri atas kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan arsip.¹² Oleh karena itu, peneliti perlu mengidentifikasi dan menentukan sumber data yang relevan untuk memperoleh informasi yang utuh dan kontekstual mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek atau narasumber penelitian melalui wawancara, observasi, dan partisipasi langsung di lapangan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip, laporan, berita, serta literatur yang mendukung dan memperkuat analisis. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi dokumen perizinan dan regulasi terkait kawasan cagar budaya dan aktivitas pertambangan, berita media massa terkait konflik yang terjadi di kawasan Muaro Jambi, serta jurnal ataupun kajian yang dibutuhkan.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 225.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama proses pengumpulan data. Menurut Moleong, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen kemudian diolah dan diinterpretasikan dengan fokus pada penajaman makna, yang seringkali dilukiskan dalam kata-kata daripada angka-angka dan sejauh mungkin disimpan dalam bentuk aslinya.¹³ Setelah pengumpulan data, langkah-langkah berikut diambil untuk melakukan analisis data:

1. Reduksi data

Merangkum dan mempertahankan informasi penting sehingga data yang sudah direduksi memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya.

2. Penyajian data

Langkah selanjutnya adalah menyediakan data setelah data direduksi. Data dalam penelitian kualitatif dapat disajikan dalam bentuk bagan, diagram aliran, atau uraian singkat.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Tahap berikutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Jika kesimpulan yang dibuat peneliti pada tahap awal hanyalah sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukungnya pada tahap pengumpulan data berikutnya, maka kesimpulan awal peneliti tidak kredibel atau dapat diandalkan.

¹³ Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja

1.7.7 Teknik Pengumpulan Data

Karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data, Sugiyono menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Menurut Harsono, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan kontekstual mengenai subjek penelitian.¹⁵ Observasi dilakukan guna memahami persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan, khususnya yang berkaitan langsung dengan perilaku, aktivitas, serta interaksi sosial para pelaku yang terlibat. Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk mengamati situasi konflik yang terjadi di sekitaryang terjadi di sekitar aktivitas penimbunan batu bara di kawasan KCBN Muaro Jambi, serta melihat secara langsung bagaimana dinamika di lapangan yang terjadi antara perusahaan, pemerintah, pengelola situs, dan masyarakat.

b. Wawancara

Harsono mengatakan wawancara adalah proses pengumpulan data di mana informasi diperoleh langsung dari sumbernya.¹⁶ Wawancara merupakan metode dengan menanyakan sesuatu pada informan atau responden tentang topik

¹⁴ Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

¹⁵ Harsono, *Metodologi Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 112.

¹⁶ Ibid.

penelitian. Wawancara menanyakan sesuatu pada informan atau responden tentang topik penelitian. Wawancara dapat dilakukan dengan Tanya jawab secara langsung atau dengan menggunakan pedoman wawancara. Proses wawancara yang menggunakan pedoman umum wawancara, menurut Patton, melibatkan penerapan pedoman umum wawancara, yang berarti wawancara dilengkapi dengan pedoman umum wawancara dan mencantumkan masalah yang harus dibahas dengan tidak menentukan urutan pertanyaan, atau bahkan mungkin tidak berbentuk pertanyaan yang eksplisit.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk mendapatkan data tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui buku dan sumber lain. Ini dapat dilakukan dengan mengambil foto kegiatan penelitian dan sebagainya.

1.7.8 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk menegaskan apakah penelitian dilakukan secara ilmiah dan untuk menguji validitas data yang dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif, terdapat empat jenis teknik triangulasi yang dikenal, yaitu:

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber melibatkan pemeriksaan informasi melalui sejumlah beragam sumber. Untuk menguji kepercayaan penerapan strategi reduktif dan komunikasi persuasif maka peneliti perlu menguji keabsahan data melalui para stakeholder yang terlibat dalam kerjasama, baik dari instansi pemerintah maupun sektor swasta. Informasi yang dianalisis dapat disimpulkan yang selanjutnya dapat dilakukan kesepakatan dari para stakeholder.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dapat dipergunakan peneliti dengan melakukan pengecekan kepada sumber, tetapi dengan metode yang berbeda. Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber perlu diverifikasi melalui penggunaan teknik observasi dan pemeriksaan dokumen.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu bisa dilaksanakan dengan memverifikasi kembali informasi kepada sumber yang sama, menggunakan teknik yang identik namun pada hari dan waktu yang tidak sama. Apabila hasil yang diuji sangat berbeda dengan sebelumnya, peneliti dapat melakukan secara berulang sampai mendapatkan kepastian.

1.7.9 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, keterbatasan yang dihadapi terutama terkait dengan kesulitan dalam mewawancarai perwakilan dari perusahaan batu bara yang beroperasi di sekitar Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi. Salah satu keterbatasan utama dalam penelitian ini adalah belum terlaksananya wawancara langsung dengan pihak perusahaan batu bara yang beroperasi di sekitar kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi. Upaya untuk menjalin komunikasi dan permohonan wawancara telah dilakukan peneliti, namun hingga proses penyusunan penelitian ini selesai, pihak perusahaan belum dapat memberikan tanggapan yang memungkinkan dilakukan wawancara. Terdapat pertimbangan yang peneliti simpulkan terkait perusahaan tidak dapat diwawancarai adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Internal Perusahaan

Banyak perusahaan memiliki kebijakan internal yang membatasi keterlibatan pihak manajemen atau karyawan dalam wawancara yang melibatkan isu-isu sensitif tanpa persetujuan dari pihak yang lebih tinggi.

2. Isu Sensitif dan Potensi Dampak Hukum

Perusahaan menghindari berbicara tentang dampak operasional mereka terhadap situs bersejarah, karena dapat berisiko menimbulkan masalah hukum atau kontroversi yang lebih luas terkait izin dan kewajiban mereka terhadap lingkungan dan masyarakat.

3. Fokus pada Perundingan atau Proses Mediasi

Perusahaan terlibat dalam perundingan atau mediasi secara formal dengan pihak-pihak yang lebih relevan (misalnya, pemerintah daerah, DLH, atau pihak berwenang lainnya) dibandingkan untuk berpartisipasi dalam wawancara penelitian yang bisa mengirimkan ketegangan atau mengarah pada penyelesaian masalah yang lebih panjang.

Namun demikian, peneliti memahami bahwa kondisi ini tidak terlepas dari sensitivitas isu yang diangkat, mengingat keterlibatan perusahaan dalam aktivitas ekonomi yang bersinggungan langsung dengan kawasan cagar budaya nasional, yang memiliki dimensi historis, kultural, dan regulatif yang kompleks. Situasi ini dapat menimbulkan kehati-hatian dalam membuka informasi secara langsung

kepada pihak luar, termasuk peneliti. Sebagai bentuk kompensasi atas keterbatasan ini, peneliti melakukan triangulasi data dengan menambahkan narasumber dari instansi terkait serta mengumpulkan data sekunder lebih banyak dari dokumen resmi, pemberitaan media, dan kajian akademik guna menjaga objektivitas serta memperkuat validitas temuan dan analisis dalam penelitian ini. Selain itu, proses pengumpulan data dalam penelitian ini mengalami beberapa kendala yang perlu dicatat. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan waktu yang tersedia untuk wawancara dengan instansi terkait, sehingga tidak semua pihak yang seharusnya diwawancarai terlibat. Beberapa instansi yang menjadi sasaran penelitian belum bersedia untuk diwawancarai sehingga berpengaruh pada kedalaman data yang diperoleh.

Untuk menghindari tertunda lebih lanjut dalam proses penelitian, penulis memutuskan untuk mengambil sampel instansi yang sudah berhasil diwawancarai dan menggali lebih lanjut dalam menggunakan data sekunder yang relevan untuk melengkapi informasi yang diperlukan. Namun keputusan ini diambil agar penelitian dapat tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan, tanpa mengorbankan kualitas penelitian secara signifikan. Kendala ini tidak mengurangi validitas temuan penelitian, namun menjadi salah satu keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam analisis lebih lanjut atau penelitian berikutnya.